

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **2.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara**

Untuk mengetahui sejarah singkat tentang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I, kita harus mengetahui dasar hukum terbentuknya instansi tersebut, sejak dulu sampai sekarang. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I terbentuk berdasarkan keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1964 Nomor PKN/1/6/4 dan mulai beroperasi pada Januari 1965 dengan nomenklatur pada saat itu yaitu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

Dalam sejarah perjalannya sejak Januari 1965 sampai saat ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur mulai dari :

- Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ( tahun 1965)
- Kantor Bendahara Negara ( tahun 1968)
- Kantor Perbendaharaan Negara ( tahun 1975)
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( tahun 1990) sekaligus memisahkan KPKN Bandung I dan KPKN Bandung II berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989

Nomor.645/KMK.01/1989.

Sejalan dengan pengembangan Organisasi pada tahun 2002 KPKN Bandung II bergabung dengan KPKN Bandung I dan menjadi KPKN Bandung. Pada tahun 2004 KPKN mengalami perubahan nomenklaturnya menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung.

Kemudian, untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor.214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung terpecah menjadi KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.

### **2.1.1 Visi dan Misi Intansi**

Dalam mencapai keberhasilan tugas dan fungsi pokok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 dan fungsi KPPN sebagai pemegang Kuasa BUN di daerah, KPPN Bandung I mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

#### **Visi :**

Berdasarkan kesepakatan bersama Visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebagai berikut : “Menjadi pelaksana kuasa bendahara umum negara di daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mewujudkan pelayanan prima”.

## **Misi**

Untuk mencapai Visi diatas, kemudian disusun Misi yaitu pernyataan mengenai hal – hal yang harus di capai di masa depan oleh semua pihak yang akan memberikan arahan jangka panjang sehingga memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi. Misi akan menyatakan kepedulian organisasi terhadap pelanggan, dan merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapainya. Dengan kriteria penyusunan misi tersebut. Maka Misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggotanya adalah terdiri dari :

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan layanan bebas gratifikasi.
2. Mengelola penerimaan Negara secara profesional, akurat, dan akuntabel.
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat, kredibel, dan tepat waktu.

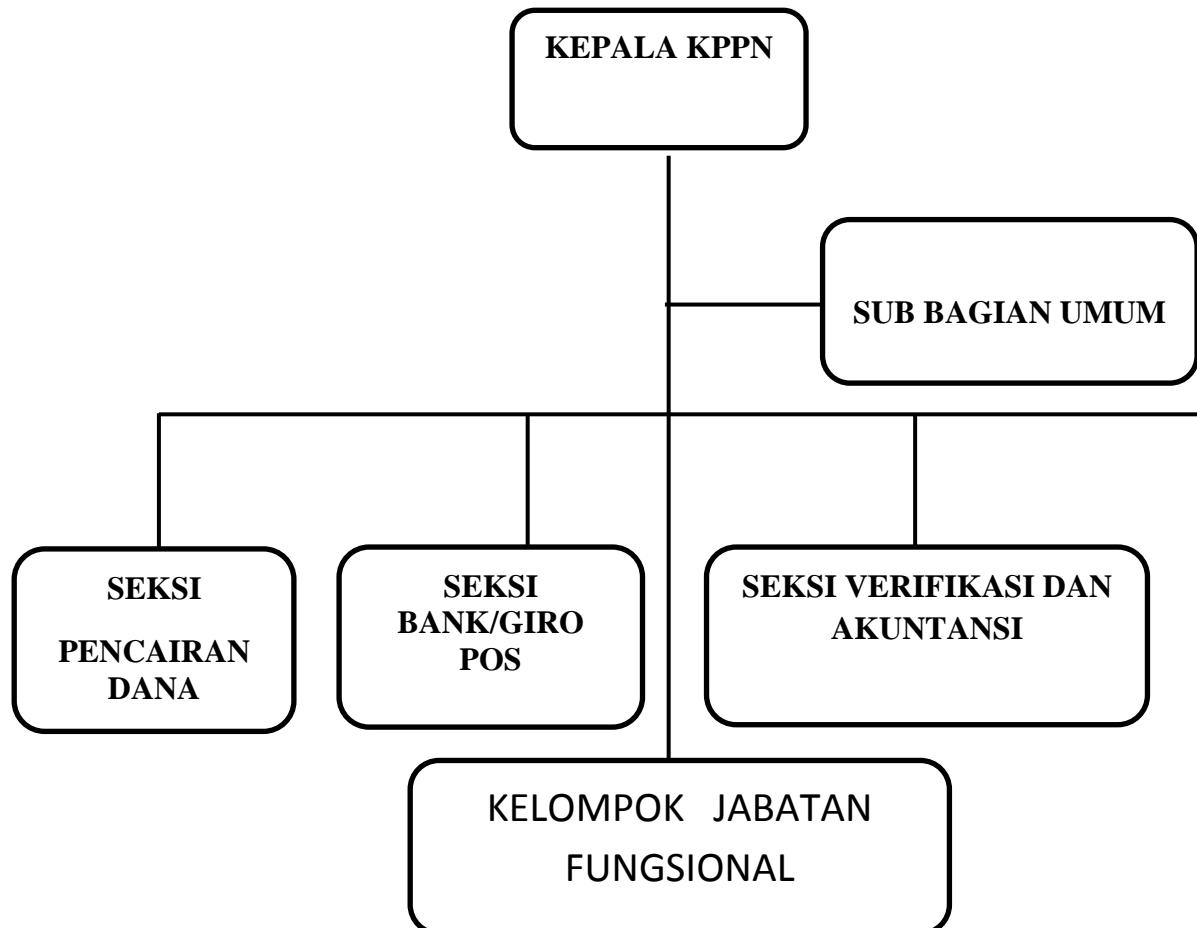
## **2.2. Struktur Organisasi Instansi**

Secara sederhana KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) memiliki tugas dalam hal pelaksanaan pencairan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk satker (Satuan Kerja), administrasi penerimaan dan pengeluaran Negara, pelaporan dan pertanggungjawaban atas

penerimaan dan pengeluaran serta fungsi pendukung administrasi. Semua fungsi diatas diakomodasikan kedalam struktur organisasi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

**Struktur Organisasi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)****Bandung I.**

Sumber: kantor pelayanan pembendaharaan bandung 1

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi kantor pelayanan pembendaharaan Negara bandung 1**

### **2.3. Deskripsi Jabatan**

Adapun bagian-bagian jabatan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I sebagai berikut :

#### **1. Kepala**

Kepala bertugas untuk menyusun program KPPN Bandung I dalam melayani masyarakat untuk mengelola anggaran keuangan, informasi data dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan perbendaharaan negara serta mengevaluasi program agar bisa berjalan dalam kegiatan operasional kantor.

#### **2. Sub Bagian Umum**

Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, sumber daya manusia dan keuangan kantor. Serta memanage resiko-resiko yang dihadapi dan mengatur pengendalian internal tata usaha, rumah tangga, dan kehumasan.

#### **3. Seksi Perbendaharaan**

Penguji untuk melanjutkan tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan), penerbitan Surat Pengesahan Pendapatam dan Belanja (Badan Layanan UMUM) BLU, pengelolaan dana kontrak, data suplier , dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker.

#### **4. Seksi Bank**

Bertugas untuk melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dengan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas tagihan yang telah jatuh tempo sesuai dengan SPPT (Surat Perintah Persetujuan Pembayaran Tagihan) yang telah diterbitkan. Oleh seksi pencairan dana, melakukan fungsi manajemen kas, pengelola rekening kuasa BUN dan bendahara serta penatausahaan pengambilan pendapatan dan penerimaan negara.

#### **5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi**

Bertugas untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan regional.

#### **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala KPPN.

#### **2.4. Aspek Kegiatan Instansi**

Aspek kegiatan di Instansi Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Bandung I adalah sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang- undangan.

2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara).
3. Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN.
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara.
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN;
8. Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi.
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
12. Pelaksanaan kehumasan.
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Berikut adalah jenis – jenis pelayanan di KPPN Bandung I :

Jenis Pelayanan	Penerima Pelayanan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencairan Dana APBN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</li> <li>• Penatausahaan penerimaan Negara berupa penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP</li> <li>• Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)</li> <li>• Bimbingan teknis kepada mitra kerja dalam pelakanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menerima alokasi dana Dekon/TP</li> <li>• Masyarakat luas termasuk dunia usaha</li> <li>• Instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menerima alokasi dana Dekon/TP</li> <li>• Instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menerima alokasi dana Dekon/TP</li> </ul>

Sumber: kantor pelayanan pembendaharaan bandung 1

**Gambar 2.2**

**Jenis – jenis Pelayanan KPPN Bandung I**